

PERSPEKTIF KEANEKARAGAMAN SOSIAL

Analisis keanekaragaman kelompok sosial
dalam masyarakat multikultural

Makalah

Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah

FPIPS UPI Bandung

Oleh :

Drs. Syarif Moeis

NIP : 131 811 175



**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG 2008**

PERSPEKTIF KEANEKARAGAMAN SOSIAL

Analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural

1. Pandangan umum

J.S. Furnivall (1967), seorang sarjana bangsa Belanda yang banyak menulis tentang Indonesia, memberikan suatu gambaran tentang masyarakat majemuk ini, dia mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat berbeda satu sama lain.

Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau setidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Atau kalau kita ingin meminjam istilah Clifford Geertz (1989), maka masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat *primordial*.

Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van den Berghe (1967) menyebutkan beberapa karakteristik berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni :

- (1) terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain,

- (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer,
- (3) kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar,
- (4) secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
- (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi;
- (6) serta adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Setiap kehidupan bersama tentu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi, dan dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda dengan orang-orang lainnya, baik dasar pengetahuan, pertimbangan, orientasi kepentingan, ataupun pengalaman. Keluarga, sebagai unit terkecil dari suatu kesatuan sosial, tidak selalu ada dalam keseimbangan, walaupun kedudukan-kedudukan, peranan-peranan, serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalamnya diatur secara jelas; dalam keluarga, kontrol sosial antara anggota satu terhadap anggota lainnya relatif dapat dilaksanakan dengan mudah, tetapi tidak jarang terjadi pertentangan-pertentangan yang akhirnya menimbulkan hilangnya keutuhan keluarga yang berangkutan. Dalam kelompok sekecil keluarga pun keadaan persatuan dan perpecahan sangat memungkinkan terjadi, apalagi bila diimplementasikan dalam bentuk pengelompokan yang lebih besar, tetangga, masyarakat, terlebih masyarakat multikultural. Dalam Bab ini kita akan dicoba melakukan suatu kajian tentang masyarakat Indonesia, berdasarkan ikatan-ikatan yang mempersatukan atau berpotensi memisahkan satu sama lain, sebagai salah satu konsekuensi kemajemukan masyarakat dan kebudayaannya.

2. Keanekaragaman masyarakat Indonesia : Suatu Analisa

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horisontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah satu bentuk masyarakat majemuk, dalam arti suatu masyarakat yang terdiri dari atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia disebut sebagai suatu tipe masyarakat yang hidup di daerah tropis dimana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai minoritas, sekaligus adalah penguasa yang memerintah orang-orang Indonesia Pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan orang-orang Tionghoa, sebagai golongan terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah diantara kedua golongan tersebut diatas.

Di dalam kehidupan politik, pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan ras, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial mereka adalah tidak utuh. Orang-orang Belanda datang ke Indonesia adalah untuk bekerja, akan tetapi mereka tidak tinggal menetap. Kehidupannya semata-mata berada disekitar pekerjaan itu, dan mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak sebagai warga negara, melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka. Banyak pula diantara mereka yang kemudian tinggal menetap untuk beberapa lama, akan tetapi setelah itu mereka kembali ke negerinya dengan pengetahuan tentang Indonesia tidak lebih dari pengetahuan seperti pada saat mereka datang.

Orang-orang Timur Asing, terutama orang Tionghoa, seperti halnya dengan orang-orang Belanda, juga datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Dalam pada itu kehidupan orang-orang pribumi, seperti halnya dengan kehidupan orang Belanda dan Tionghoa, tidaklah utuh pula. Kehidupan mereka tidaklah lebih dari kehidupan pelayan di

negerinya sendiri. Secara keseluruhan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda merupakan suatu masyarakat yang tumbuh atas dasar sistem kasta tanpa ikatan agama; orang-orang Belanda, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang Pribumi, melalui agama, kebudayaan, dan bahasa mereka masing-masing, mempertahankan atau memelihara pola pemikiran dan cara-cara hidup mereka masing-masing. Hasilnya, sebagaimana telah disinggung di atas, ialah berupa masyarakat Indonesia yang sebagai keseluruhan tidak memiliki kehendak bersama.

Di dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama itu menemukan pernyataannya di dalam bentuk tidak adanya *permintaan sosial* yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat (*common social demand*). Setiap masyarakat politik, dari kelompok nomad sampai bangsa yang berdaulat, berangsur-angsur melalui suatu periode waktu tertentu membentuk peradaban dan kebudayaannya sendiri; membentuk keseniannya sendiri, serta membentuk berbagai kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari; sebagian daripadanya berupa terbentuknya sistem pendidikan informal dengan mana setiap anggotanya tersosialisir sebagai anggota dari masyarakat tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan agama, politik, dan keindahan, atau apapun semua bentuk kebutuhan kultural, memiliki aspek ekonomi oleh karena semuanya pada akhirnya menyatakan diri secara terorganisir hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi, yaitu sebagai permintaan atau demand masyarakat sebagai keseluruhan. Akan tetapi, di dalam suatu masyarakat majemuk seperti halnya dengan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, permintaan masyarakat tersebut tidaklah terorganisir, melainkan bersifat sektional (*sectional*), dan tidak ada permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat. Golongan Eropa, Tionghoa, dan golongan pribumi, masing-masing memiliki pola permintaannya sendiri-sendiri.

Tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat menjadi sumber yang membedakan karakter daripada ekonomi majemuk (*plural economy*) dari suatu masyarakat majemuk, dengan ekonomi tunggal (*unitary economy*) dari suatu masyarakat yang bersifat homogeneous. Apabila proses ekonomi di dalam masyarakat yang bersifat homogeneous dikendalikan oleh adanya *common will*, maka hubungan-hubungan sosial diantara elemen-elemen masyarakat majemuk sebaliknya semata-mata dibimbing oleh proses ekonomi dengan produksi barang-barang material sebagai tujuan utama daripada kehidupan masyarakat.

Oleh karena penggolongan masyarakat terjadi atas dasar perbedaan ras, maka pola produksi pun terbagi atas dasar perbedaan ras pula, dalam mana masing-masing ras memiliki fungsi produksi sendiri-sendiri. Orang-orang Belanda dalam bidang perkebunan, penduduk pribumi dalam bidang pertanian, sedangkan orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran yang menjadi perantara diantara keduanya. Di dalam setiap masyarakat memang selalu terdapat konflik kepentingan, antara kota dan desa atau antara kaum modal dan kaum buruh, akan tetapi lebih-lebih di dalam masyarakat majemuk maka konflik kepentingan tersebut menemukan sifatnya yang lebih tajam oleh karena perbedaan kepentingan ekonomi jautuh bersamaan dengan perbedaan ras.

3. Masyarakat Indonesia : Antara Integrasi dan Pertentangan

Dalam mengkaji kenyataan, atau gejala sosial, pengkajian cenderung berpedoman pada salah satu diantara dua pemikiran teori yang berlawanan, yaitu teori integrasi atau Konsensus menurut Parson (1962), dan teori pertentangan atau konflik strukturalis menurut Marx-Engels. (1968)

Pemikiran teori integrasi sosial yang biasanya ditampilkan sebagai teori fungsionalisme struktural di Eropa Barat dan Amerika Serikat tahun-tahun 1960-an dan permulaan tahun 1970, ternyata banyak mendapat sanggahan bahkan dikecam, oleh para penganut aliran sosiologi radikal, sebagai terkait pada ideologi yang bersifat konservatif, mencerminkan politik yang naif, dan berpedoman pada nilai-nilai golongan borjuis atau nilai-nilai kaum kapitalis. Namun, pada era tahun 1970 kemudian teori ini terhormat kembali.

Sedangkan teori pertentangan yang biasanya ditampilkan sebagai pemikiran yang sedikit banyaknya mengacu pada pemikiran Karl Marx dan F. Engels dikritik oleh banyak ahli sosiologi lain sebagai terkait pada ideologi radikal yang menghendaki perombakan total dari struktur masyarakat, hanya melihat pada adanya pertentangan antara golongan, terutama kelas sosial, dan memihak pada golongan buruh dan petani yang dianggap sebagai golongan-golongan yang tertindas.

Dalam masyarakat, terlebih dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat Indonesia, terdapat gejala-gejala yang merupakan wujud dari pertentangan sosial; para ahli sosiologi Indonesia mulai banyak yang melakukan studi tentang gejala-gejala ini yang mungkin berlawanan dengan gejala-gejala yang ditampilkan sebagai hasil pengkajian para

ahli-ahli sosiologi di atas. Para ahli diharapkan dapat memberi makna pada berbagai gejala sosial, yang menjadi sasaran perhatian dan yang dijelaskan dengan menerapkan teori-teori sosiologi, dengan mengacu pada ideologi nasional, yaitu Pancasila, dan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Tanpa adanya dasar yang kuat tentang pengetahuan masyarakat dan kebudayaan, agaknyanya agak sukar untuk menterjemahkan keragaman yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam bentuk yang utuh; perlu ketajaman wawasan tentang, bagaimana sejarah perjalanan hidup dan seperangkat perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai unsur kehidupan lainnya, sehingga dengan dasar ini agak mudah untuk memetakan tentang mengapa dan bagaimananya masyarakat Indonesia sekarang dan ke depan. Satu hal yang menjadi harapan kita semua, sebagai anggota masyarakat Indonesia tentunya, bahwa kita senantiasa menyadari bahwa masing-masing kita mempunyai potensi (kekuatan), untuk hidup dan berkembang. Hanya yang menjadi masalah yaitu bagaimana menggabungkan kekuatan-kekuatan itu agar menjadi satu kekuatan yang besar; disadari bahwa aspek-aspek seperti prasangka, primordialisme, etnosentrisme, stereotip, masih menjadi kendala untuk terjadinya suatu sintesa; yang menjadi tugas kita adalah mengidentifikasi *pertama*, mengapa faktor-faktor itu bisa timbul, dan *kedua*, walaupun sudah demikian adanya, bagaimana agar faktor-faktor itu tidak menjadi semakin berakar kuat, bahkan kalau mungkin mengikisnya secara bertahap.

4. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keragaman kelompok sosial

Suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional; pluralitas masyarakat yang bersifat multi dimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horisontal, sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang diwujudkan oleh masyarakat akan memberi bentuk pada integrasi nasional yang bersifat vertikal.

Dengan mengacu pada teori yang dikembangkan Van den Berghe, seolah menyatakan bahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu diantara dua jenis masyarakat menurut pendekatan Emile Durkheim (1966). Suatu masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit yang bersifat segmenter, akan tetapi sekaligus juga tidak disamakan pula dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi. Yang disebut pertama merupakan masyarakat yang terbagai-bagai ke dalam berbagai-bagai kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, akan tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat *homogeneous*. Yang disebut kedua, sebaliknya merupakan suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu sama lain. Di dalam keadaan yang demikian, menggunakan terminologi Emile Durkheim, maka Van den Berghe menyatakan bahwa baik solidaritas mekanis yang diikat oleh kesadaran kolektif maupun solidaritas organik yang diikat oleh saling ketergantungan di antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial, tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan dalam masyarakat yang bersifat majemuk.

Untuk lebih memperjelas gambaran tentang masalah-masalah keanekaragaman yang ada pada masyarakat Indonesia ini; dilakukan dua bentuk pendekatan, yaitu menurut pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik di bawah ini.

4.1. Pendekatan Struktural Fungsional

Dalam pandangan struktural fungsional bahwa suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi di atas landasan dua hal berikut; *pertama*, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus diantara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. *Kedua*, Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota berbagai-bagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*); oleh karena dengan demikian setiap konflik akan terjadi di antara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalties*) dari para anggota masyarakat terhadap berbagai-bagai kesatuan sosial.

Apabila kita mengikuti pandangan dasar dari para penganut fungsionalisme struktural, mulai dari Auguste Comte melalui Emile Durkheim sampai Talcott Parsons dan para

pengikutnya, maka faktor yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia tentulah berupa kesepakatan dari para warga masyarakat Indonesia akan nilai-nilai umum tertentu. Mengikuti pandangan Parsons, maka kelangsungan hidup masyarakat Indonesia tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati bersama oleh sebagian besar orang-orang Indonesia, akan tetapi lebih daripada itu nilai-nilai umum tersebut harus pula mereka hayati benar melalui proses sosialisasi.

Pada tingkat tertentu keduanya tentu saja mendasari pula terjadinya integrasi sosial pada masyarakat yang bersifat majemuk, oleh karena tanpa keduanya suatu kehidupan bersama bagaimanapun tidak mungkin terjadi; segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terikat kedalam oleh ikatan-ikatan primordial dengan sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain, mudah sekali menimbulkan konflik diantara kesatuan-kesatuan sosial tersebut. Sekurangnya akan muncul dua tingkatan konflik dari keadaan ini, yaitu: pertama, konflik yang dalam tingkatannya bersifat *ideologis*; merupakan bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh para anggotanya serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial; dan kedua, konflik yang dalam tingkatannya bersifat *politis*, merupakan bentuk-bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat. Didalam situasi konflik, maka sadar atau tidak sadar setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam diantara sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluan kesejahteraan dan pertahanan bersama.; mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitas kultural, bersaing di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

42. Pendekatan Konflik

Keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh teori fungsionalisme struktural berkaitan dengan proses integrasi dalam masyarakat majemuk sebenarnya cukup membingungkan, hal itu berkisar pada apabila konflik dianggap potensial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk, dan apabila konsensus hanya dapat tumbuh dalam derajat yang terbatas, maka bagaimana mungkin suatu masyarakat majemuk dapat bertahan dalam waktu yang panjang ?

Menurut pendekatan konflik, integrasi sosial di dalam masyarakat majemuk akan bisa dilaksanakan menurut dua keadaan, yaitu : *pertama*, integrasi sosial bisa terwujud atas dasar paksaan (*coercion*) dari satu kelompok atau kesatuan sosial yang dominan atas kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial yang lain; dan *kedua*, integrasi sosial itu bisa terwujud karena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok atau kesatuan sosial dalam bidang ekonomi.

Pandangan para penganut pendekatan konflik tersebut memperoleh kebenarannya terutama di dalam konteks masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimana sejumlah kecil orang-orang kulit putih, yaitu melalui kekuatan militer dan kekuatan politiknya, menguasai sejumlah besar pendapatan nasional. Dalam derajat tertentu pandangan tersebut juga memiliki kebenarannya untuk melihat keadaan masyarakat Indonesia sesudah jaman kemerdekaan, di mana kelemahan-kelemahan daripada mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial selama ini telah mengundang hadirnya kesatuan atau kekuatan sosial yang dominan untuk sedikit banyak memaksakan kekuasaannya untuk menjamin agar sistem sosial tetap dapat berfungsi.

Disisi lain, pandangan fungsionalisme struktural memperoleh pembenaran sendiri, oleh karena bagaimanapun juga pemaksaan tersebut akan tetap berada di dalam batas konsensus masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental; di luar itu maka hubungan-hubungan kekuasaan akan melahirkan terjadinya perpecahan atau bahkan hancurnya masyarakat Indonesia .

5. Integrasi : Kesatuan Sosial

Wujud pengakuan dari segenap warga masyarakat Indonesia tentang pertumpahan darah satu, berkebangsaan satu, dan berbahasa satu – Indonesia - , yang tumbuh sebagai hasil gerakan nasionalisme dari permulaan abad ke 20 yang berjiwa anti kolonialisme itu, merupakan konsensus nasional yang memiliki daya tiada terkira dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Fenomena ini merupakan kesadaran nasional yang menjadikan sekian banyak penduduk Indonesia merasa sebagai ‘satu’ bangsa, tidak saja dalam artian hukum, melainkan lebih-lebih sebagai kenyataan psikologis yang membedakan apakah seseorang termasuk warga bangsa Indonesia atau tidak.

Mengikuti pemikiran R. William Liddle (1968), konsensus nasional seperti itu pada hakekatnya merupakan konsensus nasional pada tingkat pertama di antara dua macam konsensus nasional yang menjadi prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh. Menurut Liddle, suatu integrasi nasional yang tangguh hanya bisa berkembang apabila : (1) sebagian besar anggota suatu masyarakat bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka menjadi warganya, dan (2) apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan daripada proses-proses politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara tersebut.

Suatu integrasi nasional yang tangguh hanya akan berkembang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu masyarakat politik dan sistem politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat tersebut. Yang *pertama* merupakan kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan warga suatu bangsa, suatu kesadaran nasional yang membedakan apakah seseorang termasuk di sebagai warga dari suatu bangsa atau tidak. Yang *kedua* merupakan konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan, suatu konsensus nasional mengenai 'sistem nilai; yang akan mendasari hubungan-hubungan sosial di antara para anggota suatu masyarakat bangsa .

Oleh karena sistem nilai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Max Weber (1958), merupakan dasar pengesahan (legitimasi) daripada struktur kekuasaan (*authority*) suatu masyarakat, maka konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan, pada akhirnya akan merupakan konsensus nasional terhadap suatu rezim tertentu yang sedang berkuasa. Dari apa yang telah di uraikan ini, jelaslah bahwa pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu , dan berbahasa satu, tidak perlu disangsikan lagi baru merupakan konsensus nasional pada tingkat pengakuan masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat politik.

Dalam pada itu, konsensus nasional mengenai bagaimana kehidupan bangsa Indonesia harus diwujudkan atau diselenggarakan untuk sebagian harus kita temukan di dalam proses pertumbuhan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi negara. Secara yuridis formal, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pada tingkat yang sangat umum telah diterima sebagai kesepakatan nasional serta lahir bersamaan dengan kelahiran negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Di dalam

kenyataan, ia memiliki akarnya di dalam sejarah pertumbuhan gerakan nasional dari permulaan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme yang telah memenjarakan bangsa Indonesia di negerinya sendiri berabad-abad lamanya. Lebih daripada itu, ia pada hakekatnya bahkan dapat dipandang sebagai perwujudan daripada nasionalisme itu sendiri.

Kalau kita ingin menyatakannya secara lebih terperinci, maka kita barangkali boleh menyebutkan sebagai berikut. *Pertama*, Pancasila, sebagaimana halnya dengan nasionalisme yang tumbuh di kebanyakan negara-negara bekas jajahan, pada hakekatnya merupakan pernyataan perasaan anti kolonialisme. *Kedua*, Pancasila pada hakekatnya merupakan pernyataan bersama dari berbagai komponen masyarakat Indonesia untuk mempersemaikan toleransi dan akomodasi timbal balik yang bersumber pada pengakuan akan kebhinekaan masyarakat Indonesia. Ia meliputi toleransi dan akomodasi timbal balik dalam bidang kesukuaan, keagamaan, kedaerahan, dan pelapisan sosial. *Ketiga*, Pancasila pada hakekatnya merupakan perumusan tekad bersama bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bersama atas dasar lima dasar pokok dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu kemudian diturunkan, atau dijabarkan, ke dalam bentuk norma-norma hukum berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Selalu demikian, maka Pancasila telah menjadi faktor yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia.

Namun demikian, sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bangsa Indonesia baru lahir sejak tanggal 17 Agustus 1945, suatu usia yang relatif masih muda bagi kehidupan suatu bangsa yang merdeka; usia yang dianggap belum cukup untuk memberika kesempatan kepada bangsa Indonesia dalam mensosialisasikan ideologi negara kepada segenap warga negara dalam bentuk disposisi-disposisi yang membimbing perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain, sampai saat ini ideologi negara tersebut masih belum mampu sepenuhnya menjadikan diri sebagai program atau piagam yang membimbing perilaku dari semua ‘ manusia Indonesia ’ di dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara Pancasila sebagai ideologi negara beserta peraturan-peraturannya masih belum dapat menjangkau jiwa sebagian besar para anggota masyarakat Indonesia, maka selama itu integrasi masyarakat Indonesia tidak atau belum akan mencapai tingkatnya yang tangguh, Di dalam keadaan yang demikian, maka orang masih lebih mudah tersosialisasi ke dalam kesatuan-kesatuan primordial yang telah hidup berabad-abad lamanya, daripada kedalam lembaga-lembaga yang bersifat nasional. Oleh karena setiap kesatuan primordial tersebut memiliki sistem nilai yang berbeda-beda, maka orang akan cenderung menafsirkan

berbagai-bagai masalah nasional, termasuk penafsiran lebih lanjut daripada Pancasila, dari sudut pandangnya sendiri, suatu hal yang menyebabkan konflik menjadi fenomena yang bersifat laten di dalam masyarakat Indonesia.

Pada tingkat ideologis, konflik-konflik tersebut dapat kita simak dalam bentuk perbedaan-perbedaan pengertian dasar di antara berbagai-bagai golongan masyarakat mengenai berbagai macam hal. Universalisme dan ajaran tentang 'keselamatan' dari golongan santri, misalnya, adalah berbeda benar dengan apa yang ada dalam alam pikiran golongan abangan di Jawa. Clifford Geertz (1989) dalam penelitiannya tentang keberadaan agama Islam pada masyarakat Jawa, yang dibaginya menjadi tiga klasifikasi; yaitu pertama, yaitu golongan yang disebutnya *Priyayi* sebagai golongan orang-orang terpandang dalam masyarakat; *kedua*, yaitu golongan *Santri* sebagai golongan orang-orang yang mempelajari Islam di lingkungan Pesantren dan para pedagang, dan ketiga, golongan *Abangan* sebagai golongan orang-orang yang pada waktu itu adalah kebanyakan petani.

Golongan abangan menganggap agama Islam sebagai agamanya orang Arab, dan oleh karena itu mereka tidak dengan sepenuh hati menghayatinya. Apa yang lebih penting dari mereka bukanlah memuji-muji kebesaran Tuhan, melainkan melakukan perbuatan yang benar. Banyak diantara orang-orang abangan yang menganggap perbuatan ritual sebagai perbuatan yang tidak penting, oleh karena kesucian yang sejati sesungguhnya berada didalam kehidupan *batin* seseorang. Oleh karena itu tempat sembahyang mereka bukanlah di mesjid atau di gereja, melainkan di dalam harti yang bersih; di dalam dunia *batin* itulah mereka merasa berhubungan dengan Tuhan.

Pengetahuan kebatinan yang oleh orang-orang abangan diyakini sebagi pengetahuan asli Jawa, yang oleh karenanya seringkali disebut juga sebagai *ngelmu kejawen*, sesungguhnya adalah kepercayaan keagamaan yang berasal dari India yang bercampur dengan kepercayaan animisme. Sekalipun hampir semua aliran kebatinan menganggap dirinya sebagai Islam, bahkan ada diantaranya yang menamakan dirinya sebagai aliran Islam sejati, namun dalam pandangan orang-orang santri mereka dianggap belum menghayati Islam dengan sesungguhnya.

6. Masyarakat Indonesia sebagai kemajemukan yang unik

Sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagi timbulnya konflik –konflik yang sedikit banyak bersifat lingkaran setan (*vicious circle*), dan yang oleh karenanya mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial diatas landasan *coercion*. Akan tetapi di lain pihak, proses integrasi tersebut juga terjadi di atas landasan konsensus bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai fundamental tertentu. Kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, sangat jelas menunjukkan betapa nasionalisme Pancasila telah menjadi daya spiritual yang sejak awal mempersatukan bangsa Indonesia.

Dalam kajian tentang masyarakat majemuk pada masyarakat Indonesia, Furnivall membaginya menjadi dua periode, yaitu pada masa kolonial dan pada masa setelah kemerdekaan. Pada masa kolonial digambarkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas sejumlah tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak berbaur, namun menurutnya kelompok Eropa, Cina dan pribumi saling melekat laksana kembar siam dan akan hancur bilamana dipisahkan

6.1. Masa penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan, konflik yang bersifat horisontal antara golongan-golongan yang mempunyai latar belakang ras dan agama yang berbeda, sekaligus merupakan konflik yang bersifat vertikal antara golongan orang Eropa sebagai lapisan kelas atas masyarakat dengan golongan Timur Asing (khususnya golongan Tionghoa) sebagai golongan menengah, dan golongan pribumi sebagai lapisan bawah yang dikuasai. Dengan perkataan lain, dimensi ras dan agama yang membedakan berbagai-bagai golongan di dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu bertemu sekaligus dengan dimensi stratifikasi sosial.

Didalam situasi yang demikian, maka bentuk *coercion* dianggap satu-satunya faktor yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dengan sebuah perumpamaan, Furnivall menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda laksana suatu konfederasi antara sejumlah negara, yang dipersatukan oleh suatu perjanjian atau di dalam batas-batas suatu konstitusi semata-mata demi tujuan-tujuan tertentu; namun keadaan ini akan tidak dapat disebut sebagai suatu *union*, oleh karena masing-masing hidup di dalam kehidupan sendiri-sendiri sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Apabila bagian-bagian suatu *union* terintegrasi secara sukarela dengan kemungkinan bagi

setiap bagian untuk menarik diri pada setiap saat secara sukarela pula, maka bagian-bagian dari masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda terintegrasi semata-mata oleh kekuasaan kolonial dan oleh paksaan dari suatu kekuatan ekonomi tertentu; tanpa coercion ini maka masyarakat Hindia-Belanda sebagai keseluruhan akan punah oleh anarki.

6.2. Masa kemerdekaan

Keadaan masyarakat Indonesia setelah masa pendudukan Hindia-Belanda tidak separah seperti pada masa itu, konflik yang ditemukan sesudah revolusi kemerdekaan bukanlah konflik antara golongan-golongan yang bersifat eksklusif, melainkan konflik antara golongan yang sedikit banyak bersifat silang-menyilang (*cross-cutting*). Sesudah revolusi kemerdekaan, konflik antara golongan-golongan di dalam masyarakat Indonesia berubah menjadi tidak bersifat eksklusif lagi; perbedaan suku bangsa, yang pada masa penjajahan lebih merupakan perbedaan ras, tidak lagi jatuh berhimpitan dengan perbedaan-perbedaan agama, daerah, dan pelapisan sosial. Perbedaan antara sukubangsa Jawa dengan sukubangsa-sukubangsa lainnya di luar Jawa tidaklah dengan sendirinya merupakan perbedaan antara golongan Islam santri, golongan Islam abangan, dan golongan Kristiani; mereka yang berasal dari sukubangsa yang berbeda-beda dapat bersama-sama menjadi anggota dari suatu golongan agama yang sama, serta begitu pula sebaliknya.

Tumpal Nainggolan dari Batak, Edwar Supit dari Manado, Donboscho dari Flores, Sentot dari Jawa, Ujang dari Jawa Barat, misalnya, dapat berdoa bersama-sama dalam suatu acara doa bersama di gereja; sementara Asep Nasution dari Batak-Sunda, Saiful Bahri dari Sumatra Barat, Malarangeng dari Makasar, Dominggus dari Papua, duduk bersama-sama sebagai anggota musyawarah Nasional dari suatu organisasi Islam. Dalam pada itu mereka yang berbeda sukubangsa dan agamanya, juga tidak senantiasa dengan sendirinya memiliki perbedaan daerah serta lapisan sosial tempat identifikasi diri ditunjukkan; para menteri kabinet di Indonesia, kita saksikan berasal dari berbagai belahan bumi di Indonesia yang berbeda latar belakang kebudayaannya, bahasa, atau pelapisan sosialnya.

Dengan perkataan lain, perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial saling silang-menyilang satu sama lain, keadaan mana menghasilkan suatu bentuk keanggotaan golongan yang bersifat silang menyilang pula. *Cross cutting affiliation* yang demikian telah menyebabkan konflik-konflik antara golongan di Indonesia, menjadi

terlalu tajam. Kalaupun kemudian misalnya terjadi konflik antar sukubangsa, maka keadaan itu akan segera tereduksi oleh bertemunya loyalitas keagamaan, daerah dan pelapisan sosial dari para anggota sukubangsa sukubangsa yang terlibat dalam pertentangan tersebut; demikian juga sebaliknya, apabila yang terjadi adalah konflik antara agama, daerah, atau pelapisan sosial.

Oleh karena *cross cutting affiliation* senantiasa menghasilkan *cross cutting loyalties* itulah maka sampai pada suatu tingkat tertentu masyarakat Indonesia juga terintegrasi di atas dasar tumbuhnya perbedaan-perbedaan sukubangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial yang bersifat silang menyilang (*cross-cutting*). Adalah oleh karena kurang dimilikinya sifat-sifat itu, maka konflik antara golongan Tionghoa dengan golongan-golongan lainnya yang bisa disebut sebagai golongan pribumi, mudah sekali terjadi, bahkan tidak jarang menjadi konflik yang menimbulkan kekerasan; sebagai mana kita ketahui bersama, lebih dari golongan-golongan yang lain, maka golongan Tionghoa adalah yang paling bersifat eksklusif dilihat dari sudut agama, tempat tinggal, dan pelapisan sosial. Namun demikian oleh karena jumlah mereka tidak terlalu besar, keadaan ini tidak mengurangi besarnya peranan struktur kemasyarakatan yang bersifat silang-menyilang sebagai faktor yang dapat mengintegrasikan masyarakat secara keseluruhan.

Bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme yang terwujud dalam Pancasila yang senantiasa bertanggung secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik-konflik yang bersifat *coercive*, maka struktur masyarakat Indonesia yang bersifat silang-menyilang itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari masa ke masa, kendati ia harus mengarungi samudera yang penuh dengan gelombang dan badai pertentangan.

Daftar Pustaka

- Berghe, van den, Pierre, (1967). *Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis*, dalam N.J. Demerath III et.al.eds., *System, Change, and Conflict*, The Free Press, New York, Collier-McMillan limited, London.
- Frederick, W.H-Soeroto, S. ed. (1984). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi*; Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, J.S., (1967), *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press.
- Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terj.), Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
- Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia* (terj.), Jakarta: Yayasan Koentjaraningrat.
- (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Lawang, Robert. (1985). *Sistem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Kurunika Universitas Terbuka.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sanderson, (2000) *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Saripudin, Didin (2005). *Mobilitas dan Perubahan Sosial*, Penerbit : Masagi Foundation, Bandung
- Soekanto, Soerjono. (1979). *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*, Penerbitan : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

